



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI AHMAD FAISAL
2. Jabatan : WAKIL KEPALA SATUAN PENGEMBANGAN STRATEGIS DAN REPUTASI
UNIVERSITAS
3. NHK : 1015265

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.890.000.000

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/150 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
4. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 163 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 480.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV PRESTIGE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 150.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 125.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.645.000.000

III. HUTANG

Rp. 939.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.706.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.